

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Arab Spring yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011 telah menyebabkan masuknya pengungsi yang sangat besar ke negara-negara lain, termasuk Eropa.¹ Pengungsi ini terutama muncul akibat perang saudara yang terjadi di beberapa negara, seperti Libya dan Suriah. Menurut data yang dikeluarkan oleh UNHCR, pada tahun 2020 terdapat sekitar 6,7 juta orang pengungsi Suriah di seluruh dunia.²

Data tersebut merupakan jumlah pengungsi terbesar dari satu negara yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Permasalahan pengungsi merupakan masalah transnasional dan telah menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dunia yang juga dikenal dengan *shared problem*.³ Permasalahan pengungsi telah diatur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967⁴ yang merupakan dokumen hukum internasional yang mengatur hak-hak pengungsi dan kewajiban negara-negara dunia dalam menangani masalah pengungsi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut diantaranya non-refoulement⁵, non-diskriminasi, dan memberikan perlindungan bagi pengungsi.

¹ Mohammed T. Bani Salameh, "Migration from the Arab Spring Countries to Europe: Causes and Consequences," *Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future* (2019): 243

² United Nations High Commissioner for Refugees, "Syria Emergency," *UNHCR* (UNHCR, The UN Refugee Agency, n.d.), diakses January 13, 2023, <https://www.unhcr.org/syria-emergency.html>.

³ Nagel, 1990:303 dalam Hakovirta, H. (1993). *The Global Refugee Problem: A Model and Its Application*. *International Political Science Review*, 14(1), 35–57.

⁴ UNHCR. *The 1951 Refugee Convention*. Diakses 5/10/2022 pada <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

⁵ Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh mengembalikan (refouler) pengungsi ke negara asalnya atau ke negara lain di mana ia bisa mengalami bahaya atau kekerasan.

Pada tahun 2015 sekitar 1,2 juta orang memohon untuk mendapatkan status pengungsi di Eropa.⁶ Jumlah terbesar datang dari Suriah, yaitu sekitar 362.800 (29%) orang, disusul oleh Afghanistan dengan sekitar 178.200 (14%) orang, dan Irak dengan sekitar 121.500 (10%) orang. Negara-negara di Eropa yang paling banyak menerima pengungsi pada tahun 2015 adalah Jerman, yaitu sekitar 441.800 (35%) orang, disusul oleh Hungaria dengan sekitar 174.400 (12%) orang, dan Austria dengan sekitar 85.500 (7%) orang.⁷

Banyak pengungsi yang datang ke Eropa menggunakan jalur laut dari Turki ke negara-negara Eropa selatan, terutama ke Yunani dan Italia.⁸ Namun, ada juga yang menggunakan jalur darat melalui Balkan, atau menyeberang ke Inggris melalui terowongan bawah laut Calais di Prancis.⁹

CEAS (Common European Asylum System) adalah sistem yang dibuat oleh UE untuk menangani masalah perlindungan sementara dan penyelesaian masalah pengungsi di wilayah Eropa.¹⁰ CEAS terdiri dari dua bagian utama: bagian pertama adalah kebijakan yang mengatur proses pengajuan permohonan perlindungan sementara di Eropa, termasuk standar yang harus dipenuhi oleh negara-negara

⁶ Phillip Connor, "Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015," *Pew Research Center's Global Attitudes Project*. 20 Agustus 2020, diakses 13/1/2023, <https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/>.

⁷ Eurostat, "Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015," Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015 - Products Euro Indicators – Eurostat. 4 Maret 2016, diakses 13/1/2023, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/3-04032016-ap>.

⁸ Patrick Kingsley, "Refugee Crisis: Apart from Syrians, Who Is Travelling to Europe?," *The Guardian*. 10 September 2015, diakses 13/1/2023, <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/10/refugee-crisis-apart-from-syrians-who-else-is-travelling-to-europe>.

⁹ Miranda Alexander-Webber, "Calais Imigrants Undaunted by Extra French Riot Police," *Reuters* 30 Juli 2015, diakses 13/1/2023, <https://www.reuters.com/article/us-france-channel-idUSKCN0Q41MC20150730>.

¹⁰ Niemann, Arne; Zaun, Natascha (2017). EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: Theoretical and Empirical Perspectives. *JCMS: Journal of Common Market Studies*

anggota dalam menangani permohonan tersebut. Bagian kedua adalah kebijakan yang mengatur proses pemindahan pengungsi ke negara-negara anggota UE, yang disebut relokasi.

Masuknya pengungsi dan imigran telah membebani sumber daya negara-negara ini dan telah menyebabkan berbagai masalah sosial-politik.¹¹ Tanggung jawab penuh terhadap pengungsi telah memberikan beban asimetris kepada negara-negara perbatasan.¹² Yunani yang menjadi perbatasan eksternal Eropa diwajibkan untuk menangani permohonan suaka dari pengungsi berdasarkan *Dublin Regulation*. Namun tekanan dari besarnya pengungsi yang datang membuat Yunani mengabaikan penerapan kebijakan tersebut.¹³ Dari segi ekonomi, beberapa negara berjuang untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang datang. Sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya beban pelayanan publik.

Munculnya gerakan populisme sayap kanan pada negara-negara terdampak, memanfaatkan sentimen anti-imigran untuk menolak pemberian suaka kepada pengungsi.¹⁴ Kelompok tersebut beranggapan bahwa pengungsi dapat mengancam kepentingan dan identitas nasional negara. Dalam beberapa kasus, anggapan tersebut dapat membentuk sikap rasisme serta serangan terhadap pengungsi dan imigran.

¹¹ Aytan Merdan HAJIYEVA and Fakhri HAJIYEV, "Migration Crisis in Europe: Political, Socio-Economic Reasons and Challenges, Ways of Solution," *Journal of Social Sciences* 5, no. 2 (2016): 32

¹² Marko Lovec. *Politics of the Schengen/Dublin System: The Case of the European Imigrant and Refugee Crisis*. Border Politics, 2016. 127–142.

¹³ D. Thym. *The Refugee Crisis as a Challenge of Legal Design and Institutional Legitimacy*. *Common Market Law Review*, 2016. 53, 1545-1574.

¹⁴ Cinpoes, R., and O.C. Norocel. "Right-Wing Populism Parties as Agents of National Culture and Welfare Chauvinism in the Post-Communist Context." In *Hope and Nostalgia at the Intersection Between Welfare and Culture*, edited by A. Hellström, M.B. Jørgensen, and O.C. Norocel. Amsterdam: Springer. forthcoming/2019

Pada tahun yang sama, peristiwa terorisme terjadi di Paris yang disebabkan oleh pengungsi ilegal yang datang dari Yunani.¹⁵ Partai politik sayap kanan mengaitkan insiden tersebut dengan masuknya pengungsi Muslim yang terus berdatangan ke Eropa¹⁶ yang kemudian berdampak pada meningkatnya xenophobia dan Islamophobia di seluruh Eropa.¹⁷

Islamophobia telah menjadi kekhawatiran publik terhadap krisis pengungsi di negara-negara Eropa terutama Jerman. Jerman menerapkan kebijakan terbuka dengan menerima sekitar 800.000 pengungsi yang sebagian besar berasal dari negara Muslim.¹⁸ Tindakan Jerman tersebut telah menimbulkan sejumlah kritikan dan protes dari negara-negara Eropa maupun masyarakat Jerman.¹⁹

Protes dilakukan oleh gerakan sayap kanan PEGIDA (*Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West*) yang mengklaim diri mereka sebagai patriot yang membela Jerman dari "Islamisasi". PEGIDA menggunakan retorika anti-Islam untuk menimbulkan ketakutan publik serta mempromosikan ujaran kebencian dan intoleransi terhadap Muslim dan pengungsi.²⁰

PEGIDA muncul setelah krisis pengungsi yang dimulai pada tahun 2015. Kelompok tersebut memanfaatkan ketakutan publik tentang ancaman yang

¹⁵ Cristina Elena POPA. The Challenges of the Schengen Area. *Expert Journal of Economics*. 2016. Volume 4, Issue 3, pp. 96-104,

¹⁶ Sebastian Jungkunz, Marc Helbling, and Carsten Schwemmer, "Xenophobia before and after the Paris 2015 Attacks: Evidence from a Natural Experiment," *Ethnicities* 19, no. 2 (2018): 274

¹⁷ Stephen Zunes, "Europe's Refugee Crisis, Terrorism, and Islamophobia," *Peace Review* 29, no. 1, 2017: 1

¹⁸ Reuters in Berlin, "Germany Raises Estimate on Refugee Arrivals to 800,000 This Year," *The Guardian*. 20 Agustus 2015, diakses 21/1/2023, <https://www.theguardian.com/world/2015/aug/20/germany-raises-estimate-refugee-arrivals-800000>.

¹⁹ Stivani Ismawira Sinambela, "IMIGRANT CRISIS: OPEN DOOR POLICY ANALYSIS," *Jurnal PIR* 2, no. 1 (August 1, 2017): 54

²⁰ Hans Vorländer, Maik Herold, and Steven Schäler, "The Development of PEGIDA: From a Movement of the Outraged to a Protest Ritual," *PEGIDA and New Right-Wing Populism in Germany* (2018): 2

ditimbulkan oleh pengungsi dan imigran.²¹ PEGIDA meyakini bahwa banyaknya pengungsi yang datang akan mengancam kebudayaan dan nilai-nilai Jerman yang mana Islam memiliki aturan dan nilai yang berbeda dengan kebudayaan barat (Yahudi-Kristen).²²

Pandangan anti-Islam tidak muncul di Jerman secara tiba-tiba atau dalam periode waktu tertentu. Dilihat dari sejarah Jerman, diskriminasi terhadap pengungsi telah ada sejak lama. Pada masa pra-Holocaust, retorika anti-Semitik dan anti-imigrasi digunakan untuk menjustifikasi diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang Yahudi dan orang asing di Jerman. Namun saat ini pandangan tersebut beralih pada retorika anti Islam melalui gerakan PEGIDA yang memiliki kesamaan ideologi dan politik di era Nazi.

Selain itu penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan kegagalan politik multikulturalisme yang diterapkan oleh Angela Merkel. Jerman memiliki undang-undang kebebasan beragama pada pasal 4 ayat 1. Berdasarkan undang-undang tersebut Jerman harus mengakui hak Muslim. Tapi pemerintah justru meningkatkan pembatasan terhadap imigran Muslim dan mendukung Islamophobia. Bangkitnya Islamophobia dapat mengancam nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, persatuan dan keragaman. Sehingga menarik untuk dikaji mengenai perkembangan Islamophobia pada kasus PEGIDA di Jerman.

²¹ Ronald Hartz, “‘The People’ and Its Antagonistic Other: The Populist Right-Wing Movement PEGIDA in Germany,” *Postdisciplinary Studies in Discourse* (2018): 233

²² Andi Arie Setya Ningrum, “Eksistensi Kelompok PEGIDA Serta Propaganda Anti-Pencari Suaka Dan Islamofobia Di Jerman,” *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 1-9.

1.2 Rumusan Masalah

Di tahun 2015, Eropa menghadapi permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang masuk dalam jumlah besar. Negara-negara anggota UE yang tergabung dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, diwajibkan untuk membantu pengungsi dan suaka yang mencari perlindungan. Namun banyaknya pengungsi yang datang telah menimbulkan dampak buruk pada sosial-politik di Eropa. Seperti munculnya kelompok sayap kanan yang memanfaatkan sentimen anti-imigran yang berakibat pada meningkatnya permasalahan xenophobia dan rasisme.

PEGIDA yang merupakan bagian dari penganut sayap kanan, digambarkan sebagai Islamophobia, xenophobia, dan anti-imigran, yang mempromosikan ujaran kebencian dan intoleransi terhadap Muslim dan pengungsi. Kemunculan aksi PEGIDA telah menjadi dampak dari penerimaan pengungsi secara masif di Jerman.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana aksi PEGIDA dalam merespon pengungsi Muslim di Jerman?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksi PEGIDA sebagai wujud Islamophobia terhadap pengungsi Muslim di Jerman.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam konsep Islamophobia melalui kasus PEGIDA.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai gambaran untuk memahami bagaimana awal kemunculan gerakan sayap kanan dan perkembangannya pada kasus PEGIDA di Jerman.

B. Manfaat Praktis

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai krisis pengungsi dan isu Islamophobia
2. Diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti lain sebagai literatur tambahan dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan isu pengungsi dan Islamophobia

1.6 Tinjauan Pustaka

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Arie Setya Ningrum²³

Pada penelitian **Eksistensi Kelompok PEGIDA Serta Propaganda Anti-Pencari Suaka Dan Islamophobia Di Jerman** yang menjelaskan mengenai PEGIDA sebagai sebuah gerakan anti-Islam di Barat yang berada di Eropa. Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana kelompok PEGIDA terbentuk, apa tujuan dan taktik mereka dalam menyebarkan propaganda anti-pencari suaka dan Islamophobia, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Jerman dan pencari suaka yang berada di sana. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat Jerman menanggapi keberadaan kelompok PEGIDA dan propaganda mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam gerakannya, PEGIDA menyebarkan sikap kebencian terhadap pencari suaka dan Islam. Keberadaan PEGIDA disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah persamaan dari nilai, identitas, norma, dan bahasa yang mendukung keberadaan PEGIDA. Faktor-faktor eksternal adalah peraturan nasional Jerman berdasarkan Republik Konstitusi Federal Jerman Pasal 5, 8, dan 9 yang memastikan

²³ Andi Arie Setya Ningrum. Eksistensi Kelompok PEGIDA Serta Propaganda Anti-Pencari Suaka Dan Islamofobia Di Jerman.

perlindungan kebebasan berekspresi, perakitan, dan asosiasi sebagai hak mendasar bagi setiap warga negara.

Perbedaan penelitian terletak pada kerangka konsep yang digunakan. Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme yang menjelaskan keberadaan PEGIDA dari identitas, norma dan nilai, serta bahasa. Kesamaan identitas memunculkan sikap yang sama antar anggota terhadap pengungsi.

Tujuan penggunaan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi yang lebih mendalam tentang gerakan PEGIDA dan propaganda anti-pencari suaka dan Islamophobia di Jerman. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang munculnya gerakan PEGIDA, termasuk dampak dari krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015, serta ideologi dan taktik yang digunakan oleh gerakan ini. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari propaganda anti-pencari suaka dan Islamophobia yang disebarkan oleh gerakan PEGIDA terhadap masyarakat dan politik di Jerman, termasuk meningkatnya polarisasi dan konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda

Penelitian kedua bersumber pada penelitian Lunyka Adelina Pertiwi dalam artikel jurnal **“Kompleksitas Rezim di UE : Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka”**.²⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang kompleksitas rezim di UE dan upaya Jerman dalam mendukung UE untuk mengurangi kompleksitas rezim dan menentukan kebijakan dalam mengatasi pengungsi dan pencari suaka. UE berpedoman erat pada freedom of movement yang mencakup prinsip keadilan, kebebasan dan keamanan semata-mata demi tujuan integrasi terutama pada aspek ekonomi.

²⁴ Lunyka Adelina Pertiwi. Kompleksitas Rezim di UE: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 3, Maret 2016.

Dihadapkan pada krisis pengungsi yaitu meningkatnya gelombang pengungsi, UE bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut. Tindakan ini sebagai bentuk dari kepatuhan pada rezim perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia PBB yang mana UE dan negara anggotanya tergabung dalam rezim tersebut.

Namun dalam prosesnya, UE mengalami penurunan solidaritas begitu pun dengan integrasi kewasannya. Negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Timur mulai meningkatkan proteksi perbatasan demi mencegah masuknya pengungsi yang datang. Namun ada juga negara yang membiarkan pengungsi melewati perbatasan menuju negara lain tanpa adanya keinginan untuk menerima mereka seperti Austria. Negara Jerman dan Itali menganggap tidak adanya solidaritas diantara negara anggota UE dan mengkritik UE yang terkesan tidak peduli dengan karena minimnya bantuan teknis dari UE.

Kemampuan UE dalam merespon lonjakan pengungsi dinilai lemah hingga menciptakan krisis politik internal di antara negara anggota. Hal ini merupakan hasil dari kompleksitas rezim yang saling berkaitan satu sama lain yang membuat UE sulit dalam menentukan kebijakan yang layak dalam menangani pengungsi. Penelitian ini berfokus pada UE terkhususnya Jerman dengan topik penelitian seputar krisis pengungsi. Penelitian ini menggunakan konsep rezim dengan indikator kompleksitas rezim dan *strategic inconsistency*. Penelitian menjelaskan upaya Jerman yang menguraikan rezim-rezim yang saling tumpang tindih dan menghasilkan solusi bagi UE.

Tujuan penggunaan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan kompleksitas dalam menangani krisis

pengungsi di Uni Eropa (UE), terkhususnya negara Jerman. Penelitian ini menjelaskan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masalah pengungsi dan pencari suaka di UE, termasuk faktor-faktor seperti konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di UE.

Penelitian ketiga merujuk pada Marco Bitschnau, Dennis Lichtenstein, dan Birte Fährnich, dengan judul **“The ‘Refugee Crisis’ as an Opportunity Structure for Right-Wing Populismet Social Movements: The Case of PEGIDA”**²⁵.

Penelitian ini menganalisis tindakan PEGIDA khususnya mengenai retorika anti pengungsi terhadap permasalahan krisis pengungsi tahun 2015. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari pidato yang diadakan pada demonstrasi PEGIDA antara tahun 2014 dan 2016. Penelitian ini mengidentifikasi dua kerangka utama dari retorika PEGIDA terhadap pengungsi. Kerangka awal meliputi Islamisasi Eropa, sedangkan kerangka kedua menganggap bahwa krisis pengungsi menimbulkan ancaman. Temuan dari penelitian menjelaskan bahwa krisis pengungsi merupakan struktur peluang yang membantu gerakan sosial populisme sayap kanan untuk merevitalisasi pesan mereka dan memperluas audiens mereka.

Penelitian ini berfokus pada upaya PEGIDA untuk memperoleh audiens dan menyebarkan pandangannya mengenai pengungsi, khususnya pada tindakan demonstrasi. Penelitian ini menganalisis konten dari demonstrasi yang diadakan dari tahun 2014 hingga 2016. Tujuan penggunaan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana krisis pengungsi dapat menjadi peluang bagi gerakan sosial sayap kanan populisme, dengan fokus pada kasus

²⁵ Marco Bitschnau, Dennis Lichtenstein, and Birte Fährnich, “The ‘Refugee Crisis’ as an Opportunity Structure for Right-Wing Populismet Social Movements: The Case of PEGIDA,” *Studies in Communication Sciences* 21, no. 2. 2021: 1-13.

PEGIDA di Jerman. Artikel tersebut berusaha menjelaskan bagaimana situasi krisis pengungsi dapat memberikan kesempatan bagi gerakan sosial sayap kanan populisme untuk menarik dukungan dan meningkatkan pengaruh mereka di masyarakat.

Penelitian keempat merujuk pada penelitian Muhammad Zaki yang berjudul **“Pengaruh kebijakan imigrasi terbuka terhadap kemunculan Gerakan populismeme sayap kanan (PEGIDA) di Jerman tahun 2014-2016”**.²⁶ Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan imigrasi terbuka dan kemunculan gerakan populismeme sayap kanan PEGIDA di Jerman pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan laporan media.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi terbuka yang diadopsi oleh pemerintah Jerman pada tahun 2014 merupakan salah satu faktor penting dalam kemunculan gerakan PEGIDA. Kebijakan ini menyebabkan jumlah imigran yang masuk ke Jerman meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya memicu kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat Jerman.

Gerakan PEGIDA kemudian muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan imigrasi yang dianggap terlalu terbuka. Gerakan ini berhasil menarik dukungan dari sejumlah besar pendukung yang merasa khawatir akan dampak negatif dari imigrasi terhadap keamanan dan ekonomi negara.

Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme dalam menganalisis PEGIDA dan hubungannya dengan kebijakan Jerman, selain itu rentang tahun

²⁶ Muhammad Zaki (Universitas Bakrie, 2019).

berfokus pada 2014 hingga 2016. Penelitian ini digunakan sebagai rujukan penelitian dalam memahami kemunculan PEGIDA yang disebabkan oleh tindakan Jerman dalam menghadapi pengungsi.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Rangga Mufades Haekal berjudul **“Kemunculan PEGIDA sebagai Gerakan Anti-Islam di Jerman”**²⁷ membahas tentang gerakan PEGIDA yang muncul di Jerman pada tahun 2014 dan menjadi sorotan dunia karena aksi-aksi anti-Islam yang dilakukan oleh para pendukungnya. Argumen utama dari tesis Rangga Mufades Haekal mengenai PEGIDA adalah bahwa kemunculan PEGIDA sebagai gerakan anti-Islam di Jerman dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pengungsi, kekhawatiran akan keamanan, dan ketidakpercayaan terhadap media.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan PEGIDA dan dampaknya terhadap masyarakat Jerman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PEGIDA telah mempolarisasi masyarakat Jerman dan meningkatkan sentimen anti-Islam di negara tersebut.

Penelitian ini menganalisis kemunculan PEGIDA secara luas dan terperinci. Penelitian cenderung berfokus pada faktor-faktor yang menjadi kekhawatiran PEGIDA terhadap Islamisasi barat dan keamanan Jerman yang juga merupakan alasan dari kemunculan PEGIDA. Penelitian ini berisi data-data yang diperlukan bagi perkembangan penelitian dalam memahami kemunculan PEGIDA dari

²⁷ Rangga Mufades Haekal (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

berbagai sudut pandang. Faktor-faktor kemunculan PEGIDA yang dianalisis bermanfaat dalam menjelaskan dinamika PEGIDA dan krisis pengungsi di Jerman.

1.7 Kerangka Konsep

1.7.1 Islamophobia

Istilah Islamophobia mengacu pada Islam yang merupakan sebuah agama dan fobia yang berarti takut. Kata Islamophobia pertama kali digunakan pada tahun 1925 oleh dua penulis Prancis, Etienne Dinet dan Slima Ben Ibrahim, dalam buku mereka *Accès de Délire Islamophobia*.²⁸ Kemudian istilah tersebut digunakan kembali pada tahun 1991 dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Runnymede Trust, sebuah lembaga penelitian independen di Inggris yang mempelajari rasisme dan diskriminasi. Laporan ini berjudul *Islamophobia: A Challenge for Us All* dan memperkenalkan istilah tersebut sebagai bentuk baru dari diskriminasi yang ditujukan pada individu atau kelompok Muslim sebagai “orang luar”.²⁹

Seiring berkembangnya waktu, Islamophobia digunakan sebagai sebuah konsep untuk tujuan analitis. Istilah tersebut telah digunakan oleh beberapa ahli untuk mengidentifikasi sejarah, penyebab, dan konsekuensi dari sentimen anti-Islam dan anti-Muslim.³⁰

Selama revolusi Iran di tahun 1978-1979, Islamophobia digambarkan sebagai ketakutan umat Islam terhadap Islam.³¹ Alasannya adalah selama revolusi Iran, wanita Iran menolak untuk memakai jilbab yang membuat beberapa kelompok

²⁸ Christopher Allen, *Islamophobia*. London: Routledge, 2016: 1

²⁹ S Sayyid, “A Measure of Islamophobia,” *Islamophobia Studies Journal* 2, no. 1 2014: 12

³⁰ Erik Bleich, “Defining and Researching Islamophobia,” *Review of Middle East Studies* 46, no. 2 2012: 180

³¹ Christopher Allen, *Islamophobia*.

bertindak agresif terhadap wanita tersebut yang mengakibatkan ketakutan umum terhadap agama.

Laporan Runnymede mendefinisikan Islamophobia sebagai rasisme anti-Muslim.³² Islamophobia merupakan perasaan takut atau benci terhadap Islam serta segala hal yang berkaitan dengan Islam, yang menghasilkan diskriminasi terhadap individu Muslim ataupun stereotip negatif tentang agama Islam.

Berdasarkan laporan tersebut, Islamophobia merupakan fenomena rasisme yang membedakan antara kelompok superior dan inferior (orang luar). Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan Foucault mengenai kebangkitan rasisme pada pembahasan ras kuat dan ras lemah.³³ Menurutnya, ras kuat cenderung untuk mempertahankan kemurnian ras dengan menjaganya dari ras lemah dengan cara pengusiran atau membangun citra yang buruk terhadap mereka. Hal ini yang kemudian menciptakan perbedaan yang signifikan antara Muslim dan non-Muslim pada kasus Islamophobia di suatu negara.³⁴

Edward Said mengatakan bahwa negara Barat memiliki kecenderungan untuk menyebut Islam sebagai Islam versi Barat. Ia menjelaskan ketegangan politik yang terjadi antara negara Barat dan Timur (Islam) menyebabkan negara Barat berusaha untuk menggambarkan "sifat sebenarnya" dari ancaman yang ditimbulkan oleh "Islam".³⁵ Said menjelaskan bahwa Islamophobia merupakan hasil dari kebencian, takut, dan penolakan terhadap Islam dan Muslim. Prasangka negatif

³² Farah Elahi and Omar Khan, *Islamophobia: Still a Challenge for Us All*. London: Runnymede, 2017: 1

³³ MICHEL FOUCAULT, *Society Must Be Defended: Lectures at the College De France, 1975-76*, ed. Francois Ewald, Alessandro Fontana, and Mauro Bertani. London: PENGUIN Books. 2020: 61

³⁴ Scott Poynting, *Bin Laden in the Suburbs: Criminalising the Arab Other*. Sydney: Institute of Criminology. 2004: 50.

³⁵ Edward W. Said, *Covering Islam How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*. London: Vintage Books, 2010: 25.

terhadap Islam digunakan sebagai penindasan dan dominasi atas Muslim yang dianggap sebagai orang luar. Dengan demikian, Islamophobia dibentuk berdasarkan Islam versi Barat yang tidak ada kaitannya dengan Islam tetapi berhubungan dengan ketakutan Barat terhadap Islam.³⁶

Ketakutan ini didasarkan pada kurangnya wawasan yang mengakibatkan timbulnya prasangka. Seperti pendapat Huntington yang mengatakan bahwa manusia membutuhkan prasangka untuk menciptakan musuh agar dapat bersaing dan memperluas kekuasaan atas pihak lain.³⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa kemunculan Islamophobia tidak jauh dari hubungan antara Muslim dan Barat.

Menurut penjelasan Runnymede, Islamophobia memiliki empat aspek yaitu diskriminasi, prasangka, pengucilan, dan kekerasan,³⁸ yang mana dari keempat aspek ini saling berkaitan satu sama lain. Aspek pertama adalah diskriminasi terhadap umat Islam. Secara luas, Islam dianggap sebagai inferior (orang luar) dan tidak akan pernah menjadi bagian dari kelompok superior. Muslim cenderung dipandang sebagai kulit hitam dan memiliki kebudayaan yang asing seperti kebudayaan 'Asia'.³⁹

Pada aspek kedua, Islamophobia ditemukan dalam bagaimana umat Islam direpresentasikan di sebagian besar media. Muslim sering ditampilkan di media sebagai 'pelaku kesalahan',⁴⁰ dan 'biadab'.⁴¹ Laporan media cenderung menggunakan kata-kata seperti 'jihad', 'fundamentalis', 'teroris' dan 'radikal' ketika

³⁶ Nihaya Jaber, "Islamophobia: Definition, History, and Aspects," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2. 2022: 32

³⁷ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: Penguin. 2014

³⁸ Farah Elahi and Omar Khan, *Islamophobia: Still a Challenge for Us All*. 2017

³⁹ Farah Elahi and Omar Khan, *Islamophobia: Still a Challenge for Us All*. 2017: 9

⁴⁰ Scott Poynting, *Bin Laden in the Suburbs: Criminalising the Arab Other*. 2004: 50

⁴¹ Edward W. Said, *Orientalism*. London, UK: Penguin, 2021: 150.

menangani masalah apa pun yang terkait dengan serangan oleh umat Islam 'untuk membuat umat Islam terlihat jahat dan buruk'.⁴² Representasi Muslim secara negatif tidak hanya terjadi di berita tetapi juga di film dan penelitian-penelitian akademis.

Aspek ketiga yaitu pengucilan yang sering ditemukan pada bidang politik.⁴³ Beberapa politisi menghasut publik untuk takut kepada Muslim dan memperjelas perbedaan antara Muslim dan non Muslim. Politisi Inggris, Nigel Farage mengatakan bahwa Muslim di Inggris memiliki identitas yang terpisah antara agama dan nilai-nilai di Inggris.⁴⁴ Hal ini dikarenakan Muslim cenderung mengkritik tentang liberalisme, modernisasi, dan sekularisme di Barat. Sehingga Islamophobia berguna untuk mencegah menyebarnya Islam di Barat.⁴⁵

Aspek keempat dari Islamophobia adalah kekerasan berupa serangan fisik, kerusakan properti, dan pelecehan verbal terhadap Muslim.⁴⁶ Serangan ini dapat dilakukan oleh individu secara acak atau kelompok. Mereka melakukan kekerasan tidak beralasan dan terjadi di tempat umum seperti di jalan dan taman. Selain itu kelompok ini juga mengintimidasi populasi yang dianggap Muslim dan juga sekitarnya.⁴⁷

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berpedoman pada filosofi *post-*

⁴² Naved Bakali, *Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Racism through the Lived Experiences of Muslim Youth*. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers. 2016: 179

⁴³ Farah Elahi and Omar Khan, *Islamophobia: A challenge for us all*. 2017

⁴⁴ Osama Bhutta, "After Christchurch, Here's How We Can End Hate Speech and Islamophobia," *Amnesty International Australia*. 2019. Diakses 19/2/2023, <https://www.amnesty.org.au/christchurch-islamophobia/>.

⁴⁵ Farah Elahi and Omar Khan, *Islamophobia: A challenge for us all*. 2017: 10

⁴⁶ Farah Elahi and Omar Khan, *Islamophobia: Still a Challenge for Us All*. 2017: 11

⁴⁷ S Sayyid, "A Measure of Islamophobia," 2014: 15

positivisme, yaitu sebuah pemahaman dimana penelitian dilakukan untuk mempelajari kondisi nyata yang ada di lapangan (alamiah).⁴⁸ Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan, menyelidiki, dan menemukan fakta-fakta sosial yang tidak bisa diukur ataupun dijelaskan oleh pendekatan kuantitatif.⁴⁹

Kemudian fenomena tersebut dijelaskan secara keseluruhan dan dituangkan dalam bentuk bahasa pada konteks alamiah dengan menggunakan metode alamiah.⁵⁰ Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis berusaha mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis kesimpulannya dalam bentuk umum.⁵¹

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian berkisar di tahun 2015 hingga saat ini. Pada tahun 2015 terjadi puncaknya peningkatan arus pengungsi di Eropa yang mengakibatkan krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini menyebabkan dampak yang signifikan bagi UE dan juga menimbulkan dinamika konflik bagi beberapa negara anggota UE seperti penolakan pengungsi oleh PEGIDA di Jerman. Sejak dari tahun 2015, hingga sekarang PEGIDA masih aktif menjalankan demonstrasinya setiap minggu dengan retorikanya yang anti pengungsi dan anti Islam. Selain itu hingga saat ini juga Jerman masih didatangi oleh pengungsi dalam jumlah yang banyak.

1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Untuk menentukan tingkat analisa, diperlukan unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis merupakan variabel dependen, objek utama yang dianalisis

⁴⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009: 15

⁴⁹ Saryono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta. 2010: 1.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012: 6

⁵¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2009: 38

di dalam penelitian. Sedangkan unit eksplanasi merupakan variabel independen, unit yang mempengaruhi tindakan atau perilaku dari unit analisis.⁵² Dapat disimpulkan bahwa unit eksplanasi merupakan faktor yang menimbulkan suatu fenomena sedangkan unit analisis merupakan akibat dari terjadinya fenomena tersebut.

Berdasarkan penelitian “Aksi PEGIDA Terhadap Pengungsi Muslim Di Jerman”, aksi PEGIDA dijadikan sebagai unit analisis, sedangkan pengungsi Muslim Jerman merupakan unit eksplanasi. Tingkat analisis yang digunakan pada penelitian berada pada tingkatan negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif diwujudkan dalam bentuk deskriptif, seperti kata-kata lisan, tindakan dan perilaku manusia yang dapat dipahami.⁵³ Data kualitatif dapat diperoleh dari hasil pengamatan, hasil pembicaraan, dan juga bahan tertulis.⁵⁴ Namun dalam penelitian, data ini kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian pihak lain atau data yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian terdahulu, bahan pustaka, dan literatur.⁵⁵

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan atau *literature review*. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur, laporan, penelitian serta dokumen yang berhubungan

⁵² Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. 1990: 35-39

⁵³ Taylor, SJ dan R Bogdan. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings, Second Edition*. Toronto: John Wiley and Sons. 1984.

⁵⁴ MQ. Patton, *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: SAGE. 1990

⁵⁵ M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta, Indonesia :Penerbit Ghalia. 2002: 58

dengan topik penelitian.⁵⁶ Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari publikasi ilmiah, penelitian, jurnal, artikel, dokumen resmi, situs resmi pemerintahan atau lembaga organisasi, dan pemberitaan media.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya dengan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengolahan data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁷ Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data, meringkas data dengan uraian yang singkat dan menggolongkannya pada pola-pola tertentu. Penyajian data berisikan sekumpulan informasi yang telah tersusun agar dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian setelah mengamati fenomena yang telah dianalisis sebelumnya.

1.9 Sistematika Penulisan

Hasil dari penulisan ini dituangkan dalam 5 bab. Untuk bagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II Krisis Pengungsi di Jerman

⁵⁶ M. Nazir, Metode Penelitian. Bogor, Indonesia: Penerbit Ghalia. 2013: 93

⁵⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis". London: Sage Publications. 1994: 18.

Bab kedua membahas tentang krisis pengungsi di Jerman yang menjadi latar belakang dari munculnya gerakan PEGIDA dan reaksi terhadapnya. Penjelasan tersebut meliputi krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 dan bagaimana Jerman menjadi salah satu negara yang paling banyak menerima pengungsi. Bab ini juga membahas dampak dari krisis pengungsi tersebut terhadap masyarakat dan politik di Jerman, termasuk kontroversi yang muncul seputar masalah imigrasi dan multikulturalisme.

BAB III Perkembangan Islamophobia dan Kemunculan PEGIDA

Bab ketiga menjelaskan tentang latar belakang perkembangan Islamophobia di Jerman, serta bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Jerman. Bab ini juga membahas mengenai sejarah dan karakteristik PEGIDA sebagai gerakan anti-Islam di Jerman dan pengaruhnya terhadap politik dan kebijakan imigrasi di Jerman dan Eropa secara keseluruhan.

BAB IV Analisis Aksi PEGIDA Terhadap Pengungsi Muslim Di Jerman

Bab keempat membahas tentang analisis aksi PEGIDA terhadap Muslim di Jerman. Penjelasan tersebut meliputi aksi-aksi yang dilakukan oleh PEGIDA terhadap Muslim di Jerman, termasuk taktik dan retorik yang digunakan oleh gerakan ini dalam mengkritik kebijakan pemerintah terkait imigrasi dan multikulturalisme.

Bab ini juga membahas tentang implikasi dari aksi PEGIDA terhadap masyarakat dan politik di Jerman, termasuk bagaimana hal ini mempengaruhi politik dan kebijakan imigrasi di Jerman dan Eropa secara keseluruhan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penulis terkait penelitian penulis serta saran dari penulis terkait dengan dampak kebijakan pengungsi UE terhadap perkembangan PEGIDA di Eropa.

